

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Cholid Narbuku, 1997, *Metodelogi Penelitian*, Bumu Aksara, Semarang.
- Dirdjosisworo, S. (2002). *Pengadilan hak asasi manusia Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Eddy Os.Hiarieej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Kpk*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka Dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang,
- Kartono, 1992, *Peradilan Bebas*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2020, *Politik Hukum Kebijakan Legislasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Kesalahan Dan Harta Pelaku Tindak Pidana*, Raja Grafindo Jakarta.
- M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Kuhap*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, , Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana Dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pope, J. (2003). *Memberantas Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Santoso Agus, 2008, *Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh Di Kasasi*, Prannya Paramita, Jakarta.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisikedua)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Suekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-Ui Press, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangng

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Skripsi dan Jurnal

Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.

Aidil Fitriyash, F. (2023). Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Di Muka Umum Yang Mengakibatkan Kematian Orang (*Doctoral Dissertation*, Universitas Sahid Jakarta).

Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 86-98.

Amalia, I. Q. A., & Prasetyawati, E. (2019). Karakteristik asas proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba. *jhbbc*, 173-184.

Damanik, A. (2023). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Datin Law Jurnal*, 4(1).

Devinta, A. A. M. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi. *Jurnal*. (Diunduh Di [Http://Ejournal. Uajy. Ac. Id/9125/1/Jurnalhk11035. Pdf](http://Ejournal.Uajy.Ac.Id/9125/1/Jurnalhk11035.Pdf), Diunduh Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 20.17).

Dewi, N. W. L., Abdiasa, K., & Wibawa, I. G. K. A. (2018). Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Prijspraak). *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 15(1), 86-92.

Dharma, I. B. W. (2020). Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Prijspraak). *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(1), 104-112.

Friski, M. L. (2021). Putusan Bebas Pada Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid. Sus/2019) (*Bachelor's Thesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

Hatta, M., Sumiadi, Z., & Afrizal, D. T. Y. Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (*Skripsi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*).

Hutagaol, D. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 Kuhp. *Lex Crimen*, 7(4).

Jayeni, A. S. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Dalam Perkara Nomor: 202/Piid. B/2017/Pn. Pbr (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Riau).

- Kandou, R. M. F., Mamesah, E. L., & Sepang, R. (2023). Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata. *Lex Administratum*, 11(5).
- Lamsu, A. (2014). Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Verkapte Vijspraak*) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 3(4).
- Marpaung, A. N. Tinjauan Normatif Atas Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(1).
- Marselle Devinta, A. A. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi* (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Mumbunan, R. R. (2019). Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 7(10).
- Musa, F. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2021). Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 290-305.
- Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 270-285.
- Pramesta, S. M., & Faozi, S. (2023). Alasan Penghapusan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dengan Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrecht*)(Studi Kasus Putusan No. 1554 K/Pid/2013). *Yustisi*, 10(3), 204-213.
- Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144-163.
- Ridho, M. (2017). Analisis Pembuktian Alasan Pembenaar Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Putusan No. 4/Pid. Sus. Anak/2016/Pn. Ban) *Jurnal Hukum..*
- Ridlwani, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.
- Saiful Anam, Dkk., *Pendekatan Perundang-Undangan Dalam Penelitian Hukum*, (Artikel, <https://www.saplawa.com>), Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2002)
- Saputro, S. (2010). Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Wakil Bupati Karanganyar (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar (*Skripsi Hukum*, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Soedarsono, T. (2010). Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 61-84.
- Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680.
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.

- Syamsudin, M. (2010). Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 406-429.
- Wattie, A. C. (2017). Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana. *Lex Privatum*, 5(10).
- Yohannes, E. Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana.